

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DI PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Maryono¹, Fauziyah Lamaya²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kupang

Korespondensi email: maryonoumkupang@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan keuangan institusi diatur dalam PP No. 71 2010 Pasal 1 ayat (8) yang mendefinisikan SAP berbasis akrual. SAP berbasis akrual ini merupakan jenis SAP yang menganalisis pendapatan, asset, utang, beban, serta ekuitas negara dalam melaporkan keuangan berbasis akrual. SAP jenis akrual juga mengakui adanya belanja, pembiayaan, dan pendapatan negara dalam membuat laporan finansial sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada APBN/APBD. Riset ini memiliki tujuan untuk analisis penerapan SAP dengan basis akrual pada laporan keuangan di Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini menghasilkan analisis penggunaan sistem dalam pembuatan laporan keuangan di Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Hasilnya berupa penyajian neraca, ekuitas, kas, dan operasional yang sesuai dengan realisasi anggaran. Dengan begitu, Pengadilan Tinggi Agama Kupang menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) untuk mengelola keuangan institusi. Hasilnya, Pengadilan Tinggi Agama Kupang berhasil menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dengan baik karena didukung oleh pemahaman dan kemampuan pegawai bagian keuangan dalam bidang akuntansi pemerintahan dan penggunaan aplikasi SAIBA, SIMAK-BMN, dan aplikasi pendukung lainnya yang kompeten.

Kata kunci: Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan, SAP, SAIBA, SIMAK-BMN

APPLICATION OF ACCOUNTING SYSTEM BASED ON THE PREPARATION AND PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS IN KUPANG RELIGIOUS HIGH COURT

Abstract

Institutional financial management is regulated in PP No. 71 2010 Article 1 paragraph (8) which defines accrual-based SAP. Accrual-based SAP is a type of SAP that analyzes income, assets, debt, expenses, and state equity in accrual-based financial reporting. The accrual type of SAP also recognizes the existence of expenditures, financing, and state revenues in making financial reports in accordance with the rules set out in the APBN/APBD. This research aims to analyze the application of SAP on an accrual basis in financial statements at the Kupang Religious High Court. This type of research is descriptive by collecting power through observation, documentation, and interviews. This study resulted in an analysis of the use of the system in the preparation of financial reports at the Kupang Religious High Court. The result is the presentation of balance sheets, equity, cash, and operations in accordance with the realization of the budget. Thus, the Kupang Religious High Court uses the application of the Accrual-Based Agency Accounting System (SAIBA) and the State Property Management and Accounting Information System (SIMAK-BMN) to manage institutional finances. As a result, the Kupang Religious High Court succeeded in implementing the accrual-based accounting system well because it was supported by the understanding and ability of the finance staff in

the field of government accounting and the competent use of SAIBA, SIMAK-BMN, and other supporting applications.

Keywords: *Government Accounting, Financial Statements, SAP, SAIBA, SIMAK-BMN*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memiliki peran besar dalam upaya penyediaan layanan untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu wadah bagi pemerintah ialah dengan mendirikan organisasi nonprofit. Organisasi tersebut menggunakan dana negara, seperti laba, pajak, donasi, dan utang. Pembukuan dan pengelolaan dana tersebut berpedoman pada suatu format yang sudah ditentukan, yaitu SAP (standar akuntansi pemerintah). Format tersebut mengatur cara penyusunan dan penyajian laporan dana.

Menurut Arif dkk. (2002:3), pemerintah memiliki tim akuntansi khusus untuk menyediakan, mengatur, mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan menyusun transaksi keuangan negara. Adapun menurut Halim (2002:143), akuntansi pemerintah menjadi tempat bagi negara untuk mencari informasi keuangan sebelum mengambil keputusan ekonomi untuk kepentingan masyarakat luas. Keputusan tersebut dianalisis terlebih dahulu oleh para pakar sesuai nalar dan ilmu pengetahuan yang terkait.

SAP itu sendiri diatur dan tertuang pada PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Terdapat sebuah istilah SAP berbasis akrual, yaitu jenis SAP yang menganalisis pendapatan, asset, utang, beban, serta ekuitas negara dalam melaporkan keuangan berbasis akrual. SAP jenis akrual juga mengakui adanya belanja, pembiayaan, dan pendapatan negara dalam membuat laporan finansial sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada APBN/APBD.

Indonesia mengalami reformasi finansial yang mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma dalam akuntansi negara. Keadaan itu juga

menyebabkan terjadinya perubahan pandangan, yaitu dari pandangan birokratis dan mekanistik menjadi pandangan yang dinamis, fleksibel, dan mengandung bisnis. Aspek yang paling signifikan dari dasar akrual ialah sistem pengakuan dan pengukuran dasar kas negara. Dasar akrual menilai suatu keadaan keuangan tidak hanya pada saat kas dibayarkan ataupun diterima, tetapi juga melihat proses transaksi itu terjadi. Sistem pengukuran akrual difokuskan kepada pengukuran unsur ekonomis beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Laporan akuntansi dengan sistem akrual dapat berupa laporan kinerja keuangan, posisi keuangan, serta arus kas.

Pengadilan tinggi agama merupakan suatu bentuk institusi yang berada dibawah mahkamah Agung. Pengadilan tinggi agama memiliki kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban dan akuntansi atas penyelenggaraan kegiatan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 14 Tahun 2015, pengguna anggaran negara dipertanggungjawabkan oleh menteri atau pimpinan lembaga. Pemimpin itu bertanggung jawab untuk membuat dan menyampaikan laporan keuangan negara di lembaga yang ia pimpin.

Suatu institusi membutuhkan sumber daya manusia yang cakap dan ahli untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan di dalam praktik. Kemampuan yang dimiliki oleh SDM tersebut dapat berupa kompetensi, informasi, dan pengalaman. Namun, kapasitas organisasi juga harus terus dikembangkan (Insani dalam Kusuma, 2010). Data menunjukkan bahwa sebanyak 76,77% unit yang

mengelola keuangan di pemerintah pusat dan daerah ternyata tidak diisi oleh pegawai yang mempunyai riwayat pendidikan akuntansi. Masih banyak pegawai yang berasal dari ranah ilmu yang tidak memahami cara kerja akuntansi sebagai standar ilmu pengetahuan pengelolaan keuangan. Hal tersebut tampak pada banyaknya kesulitan yang dialami oleh para pegawai dalam membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan keuangan juga dituntut dapat mengikuti sistem SAP yang sudah ditetapkan. Ketidakmampuan itu disebabkan oleh para pegawai yang belum memahami ilmu akuntansi. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual tersebut tertuang pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelaksanaan atas amanah UU dapat dilakukan dengan bertahap, salah satunya dengan menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual yang berlandaskan PP No. 24 Tahun 2005. Setelah sukses menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual, kantor pemerintahan secara total dan sebenarnya melanjutkan tahapan itu dengan SAP berbasis akrual yang berdasar pada PP No. 71 Tahun 2010.

Penjelasan tersebut menjadi latar belakang bagi peneliti untuk membuat kajian ini dengan judul “Bagaimana penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan di Pengadilan Tinggi Agama Kupang?”. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana sistem akuntansi berbasis akrual diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tingkat Kementerian Negara/Lembaga khususnya pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode observasi (pengamatan langsung), interview (wawancara),

dan dokumentasi. Yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Sekretaris, Kabag Umum dan Keuangan, Kabag Perencanaan dan Kepegawaian, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, serta Pembuat Daftar Gaji atau Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Peneliti menggunakan teknik reduksi untuk menganalisis data yang kemudian disajikan ke dalam laporan secara merinci. Peneliti merangkum dan memilih hal penting dan pokok untuk disampaikan dalam laporan tersebut. Penyajian data dibuat dalam uraian deskriptif dengan adanya kesimpulan dari penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manfaat dari laporan keuangan yang berbasis akrual ialah menjadikan para pengguna dapat mengetahui posisi serta perubahan yang terjadi pada keuangan negara. Selain itu, pengguna juga dapat mengidentifikasi cara pemerintah mendanai berbagai agenda negara. Dengan begitu, kapasitas dan kualitas pemerintah dapat diukur dengan keadaan yang sebenarnya. Dari pihak pemerintah, pemerintah dapat mengetahui apa saja kemungkinan sumber daya masa depan yang dapat diwujudkan untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan PP No. 71 2010 Pasal 1 ayat (8), Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ialah sistem penghitungan akuntansi yang menganalisis beban, asset, pendapatan, ekuitas, dan utang secara akrual. Melalui sistem akrual, informasi belanja, pendapatan, dan pembiayaan kegiatan sesuai APBN atau APBD juga dapat diketahui.

Gambaran Umum Objek Penelitian

Pengadilan Tinggi Agama Kupang merupakan institusi negara yang berada di bawah Mahkamah Agung. PTA Kupang salah satunya memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan dan akuntansi institusi yang sesuai dengan APBN. Keuangan pemerintah dikelola berdasarkan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk dijadikan pedoman laporan dan acuan nominal uang yang dapat dibelanjakan dalam masa kerja satu tahun. Ada dua jenis pengelompokan DIPA, yaitu DIPA nonteknis dan DIPA teknis. DIPA nonteknis juga disebut DIPA umum yang difokuskan kepada kebutuhan pokok lembaga, seperti belanja rutin pegawai, peralatan operasional, nonoperasional, dan belanja modal. DIPA umum mengatur berbagai belanja bidang di bawah wewenang eselon I Badan Urusan Administrasi. Adapun DIPA teknis atau yang disebut juga DIPA fungsional adalah acuan untuk pembiayaan berbagai penyelesaian perkara berdasarkan tugas pokok dan fungsi lembaga. DIPA teknis dinaungi oleh tata kelola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Pengelolaan keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kupang secara struktural diselenggarakan oleh Sekretaris dibantu Kabag Umum dan Keuangan, Kabag Perencanaan dan Kepegawaian serta bagianbagian yang terkait. Untuk mengelola institusi secara fungsional, institusi membentuk jabatan pengelola anggaran, seperti sekretaris, penanggung jawab kegiatan, kepala bagian umum, kepala bagian keuangan, pembuat laporan, pengelola gaji, pengelola anggaran pegawai, dan pejabat lainnya yang mengurus institusi.

Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Sistem akuntansi yang diterapkan ialah basis akrual untuk menyusun dan menyajikan laporan

realisasi anggaran mengenai neraca, perubahan ekuitas, operasional, dan basis kas.

Akuntan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan pengukuran nilai perolehan historis. Akuntan mencatat asset pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan dengan melihat besaran yang nilainya wajar dari imbalan yang dikeluarkan untuk mendapat asset itu. Dana yang harus dikeluarkan pemerintah juga harus menunjukkan jumlah realistis (wajar). Untuk itu, kaidah pengelolaan yang bersih dan sehat harus ditegakkan di wilayah kerja pemerintah. Berikut adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

1. Pendapatan LRA
 - a. Pendapatan-LRA diakui ketika kas diterima oleh Kas Umum Negara (KUN).
 - b. Akuntansi pendapatan-LRA dijalankan sesuai dengan asas bruto. Dengan begitu, perlu adanya pembukuan penerimaan bruto dengan tidak menghitung nilai netto.
 - c. Pendapatan-LRA dilaporkan sesuai dengan pengelompokan sumber pendapatan.
2. Pendapatan LO
 - a. Pendapatan-LO ialah hak yang dimiliki institusi pusat pada masa anggaran tersebut dan tidak ada kewajiban untuk membayarnya kembali. Hak ini menjadi tambahan ekuitas.
 - b. Pendapatan-LO dinilai valid ketika hak pendapatan direalisasikan dan/atau hak tersebut timbul dengan adanya dana masuk sumber daya ekonomi.
 - c. Akuntansi pendapatan-LO diterapkan sesuai dengan asas bruto. Akuntan membuat pembukuan atas bruto yang diterima dan tidak menghitung nilai netto.
 - d. Penyajian pendapatan sesuai dengan kelompok sumbernya.
3. Belanja
 - a. Belanja ialah seluruh dana yang dikeluarkan dari rekening kas umum negara

sehingga saldo anggaran lebih pada periode itu menjadi berkurang. Pengeluaran itu tidak akan diterima pembayarannya oleh pemerintah.

- b. Belanja negara terhitung ketika terjadinya pengeluaran dana dari KUN.
- c. Dana yang keluar khusus dari bedahara diakui sebagai pengeluaran ketika KPPN mengesahkan laporan pertanggungjawaban tersebut.
- d. Penyajian belanja negara sesuai dengan pengelompokan jenis belanja dan organisasi serta fungsinya. Laporan tersebut disampaikan dalam catatan laporan keuangan.

4. Beban

- a. Beban ialah menurunnya manfaat atau potensi dari suatu barang/jasa yang dapat berbentuk konsumsi asset. Beban dihitung dalam suatu rentang waktu yang ditetapkan.
- b. Beban tersebut dinilai valid ketika kewajiban mulai timbul, konsumsi asset terjadi, dan potensi suatu jasa menurun.
- c. Beban dilaporkan sesuai dengan kelompok atas jenis belanja, institusi, serta fungsi belanja itu. Pengelompokan itu disampaikan di dalam catatan keuangan.

5. Aset

Aset dikelompokkan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan lain-lain.

6. Kewajiban

Kewajiban disebabkan oleh adanya utang pemerintah di masa lalu untuk segera diselesaikan dengan cara mengeluarkan dana dari kas negara. Kewajiban ini dibagi menjadi kelompok jangka pendek dan jangka panjang.

7. Ekuitas

Ekuitas ialah perbedaan nilai antara asset dan kewajiban institusi pada periode kerja tertentu.

Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kupang berisikan semua bentuk penggunaan

dana oleh institusi. Sistem yang digunakan untuk membuat laporan keuangan ini ialah SAI (sistem akuntansi instansi) sebagai prosedur manual dan komputerisasi. Sistem ini mencakup catatan data, ikhtisar posisis keuangan, dan operasi dana di lembaga itu.

Sistem ini juga dapat dimanfaatkan untuk basis akrual. Dengan begitu, SAI mengalami perkembangan menjadi SAIBA sebagai bentuk laporan basis akrual dan SIMAK-BMN sebagai adanya gabungan sistem informasi manajemen dan akuntansi milik pemerintah. Laporan pada SAIBA berisikan laporan neraca, realisasi anggaran, operasional, dan berubahnya ekuitas. Adapun SIMAK-BMN ialah penghasil informasi mengenai asset, persediaan, dan sebagainya untuk dibuat di dalam penyusunan neraca.

SAIBA adalah aplikasi akuntansi yang berinovasi dengan adanya basis akrual yang sesuai dengan SAP (standar akuntansi pemerintahan). Aplikasi SAIBA ini mencakup hal-hal berikut.

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berisikan laporan pendapatan dan belanja instansi. Akuntan membandingkan laporan tersebut dengan anggaran yang tersedia pada satu periode.
- b. Laporan Operasional yang berisikan rangkuman sumber daya ekonomi untuk meningkatkan ekuitas yang dikelola institusi, baik di tingkat pusa maupun regional masing-masing. Rangkuman itu menjadi pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan untuk satu periode.
- c. Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan laporan naik dan turunnya ekuitas di tiap periode untuk dibandingkan dengan periode yang lalu.
- d. Neraca yang mendeskripsikan keadaan uang kas dari entitas akuntansi dan pelaporan. Laporan itu juga menggambarkan keadaan ekuitas dana, kewajiban, dan asset pada masa kerja tertentu.
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisikan rincian dan penganalisisan nilai suatu pos pada

waktu tertentu. Rincian dan analisis ini dilaporkan di dalam anggaran dan neraca institusi.

Pembuatan aplikasi ini diawali dengan proses rekaman atas berbagai dokumen. Rekaman itu dilakukan secara manual dan elektronik. Selanjutnya, pengkaji membuat jurnal transaksi untuk dibagikan ke buku besar dan laporan keuangan. Proses-proses pembukuan dan pelaporan itu dilaksanakan dengan bantuan teknologi komputer. Dokumen yang direkam pada aplikasi SAIBA tergolong dokumen standar yang biasa digunakan, seperti DIPA Petikan Satker, Revisi DIPA, SPM/SP2D, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja, dan Memo Jurnal penyesuaian.

Selain SAIBA, sistem komputer yang juga dikaji adalah SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara). Sistem ini di dalam SIMAK-BMN saling terhubung dalam pengolahan dokumen sumber. Tujuannya ialah untuk membantu akuntan dalam menyusun neraca dan melaporkan BMN beserta dokumen manajerial lainnya yang mengikuti aturan berlaku. Sistem SIMAK-BN dan SAK berjalan beriringan dan berkelanjutan untuk menghasilkan keadaan check and balance antara belanja dan modal institusi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat diketahui bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dilaksanakan dengan baik oleh seluruh jajaran bagian keuangan di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Aplikasi SAIBA sangat bermanfaat dalam pembuatan laporan keuangan agar sesuai dan tepat prosedur. Aplikasi ini dirancang dan dikembangkan langsung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Agar aplikasi ini dapat berjalan lancar untuk pembuatan laporan keuangan pemerintah, para

pegawai juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan terkait pengelolaan akuntansi di institusi. Pegawai juga diminta untuk dapat menguasai berbagai aplikasi keuangan. Kesuksesan suatu institusi dapat dipengaruhi salah satunya oleh sumber daya manusia dan kualitas teknologi.

Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam menggunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) juga harus menyesuaikan dengan peraturan yang sedang diberlakukan dalam aplikasi tersebut, dimana aplikasi harus selalu di *update* sesuai dengan versi yang sedang digunakan oleh bagian keuangan. Berdasarkan PP 71 tahun 2010, aplikasi SAIBA berisikan berbagai laporan keuangan institusi, seperti LRA, LO, LPE, serta neraca. Adapun laporan keuangannya dibuat secara manual dengan format luaran yang sesuai dengan aturan SAIBA.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sesuai dengan PP No. 71 2010 Pasal 1 ayat (8), SAP berbasis akrual ialah jenis SAP yang menganalisis pendapatan, asset, utang, beban, serta ekuitas negara dalam melaporkan keuangan berbasis akrual. SAP jenis akrual juga mengakui adanya belanja, pembiayaan, dan pendapatan negara dalam membuat laporan finansial sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada APBN/APBD.

Laporan keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Sistem akuntansi yang diterapkan ialah basis akrual untuk menyusun dan menyajikan laporan

realisasi anggaran mengenai neraca, perubahan ekuitas, operasional, dan basis kas.

Pengadilan Tinggi Agama Kupang menggunakan dua jenis sistem dalam membuat laporan keuangan, yaitu dengan aplikasi SAIBA dan sistem SIMAK-BMN. Laporan pada SAIBA berisikan laporan neraca, realisasi anggaran, operasional, dan berubahnya ekuitas. Adapun SIMAK-BMN ialah penghasil informasi mengenai asset, persediaan, dan sebagainya untuk dibuat di dalam penyusunan neraca.

Pengadilan Tinggi Agama Kupang berhasil menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dengan baik karena didukung oleh pemahaman dan kemampuan pegawai bagian keuangan yang baik dalam bidang akuntansi pemerintahan dan kompeten dalam penggunaan aplikasi SAIBA, SIMAK-BMN, dan aplikasi pendukung lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Rusmana Oman, Dwi Martani, Warsidi, Nunuy Nur Afiah. 2012. *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Univ. Jenderal Soedirman Universitas Indonesia Univ. Jenderal Soedirman Universitas Padjadjaran
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Pengadilan Tinggi Agama Kupang. 2019. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019. Nusa Tenggara Timur
- Pengadilan Tinggi Agama Kupang. 2019. Laporan Keuangan Semester II Tahun 2019. Nusa Tenggara Timur
- Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
<http://www.pta-kupang.go.id/>